

**PUTUSAN PERCERAIAN AGAMA KRISTEN DI
TINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN
INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA
NOMER 26/PDT.G/2019/PN SLW)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum:**

Oleh :

Andhika Prasetya Sirait

NPM 5116500030

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2020

LEMBAR BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

**PUTUSAN PERCERAIAN AGAMA KRISTEN DI TINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 26/PDT.G/2019.PN.SLW)**

**ANDHIKA PRASETYA SIRAIT
NPM 5116500030**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji pada Tanggal..... dan Dinyatakan
LULUS dengan Nilai.....

Tegal,.....

Dosen Penguji I	Dr. Eddhie Praptono, S.H.,M.H.	(Penguji I)
Dosen Penguji II	Dr. Moh. Khamim, S.H.,M.H.	(Penguji II)
Dosen Pembimbing I	Dr.H. Mukhidin, S.H., M.H.	(Pembimbing I)
Dosen Pembimbing II	Dr.H. Nuridin, S.H., M.H.	(Pembimbing II)

.....
.....
.....
.....

Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 0615067604

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

(Untuk Pengajuan Ujian Skripsi)

**PUTUSAN PERCERAIAN AGAMA KRISTEN DI TINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**

(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 26/PDT.G/2019.PN.SLW)

ANDHIKA PRASETYA SIRAIT

NPM 5116500030

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal,.....

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H.

NIDN 0621076101



Dr. H. Nuridin, S.H., M.H.

NIDN 0610116002

Mengetahui,

Wakil Dekan I/

Ketua Program Studi



Kanti Rahayu, S.H., M.H.

NIDN 0620108203

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

(Untuk Skripsi yang Sudah Diujikan)

**PUTUSAN PERCERAIAN AGAMA KRISTEN DI TINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**

(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 26/PDT.G/2019.PN.SLW)

ANDHIKA PRASETYA SIRAIT

NPM 5116500030

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal,.....

Pembimbing I



Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H.

NIDN 0621076101

Pembimbing II

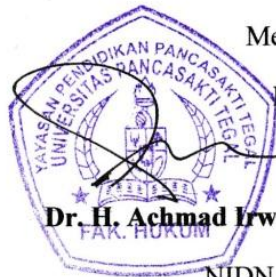


Dr. H. Nuridin, S.H., M.H.

NIDN 0610116002

Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**PUTUSAN PERCERAIAN AGAMA KRISTEN DI TINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**

(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 26/PDT.G/2019.PN.SLW)

ANDHIKA PRASETYA SIRAIT

NPM 5116500030

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal,.....

Penguji I

Dr. Eddhie Praptono, S.H.,M.H

NIDN 0617075701

Penguji II

Dr. Moh. Khamim, S.H.,M.H.

NIDN 0617026101

Pembimbing I

Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H.

NIDN 0621076101

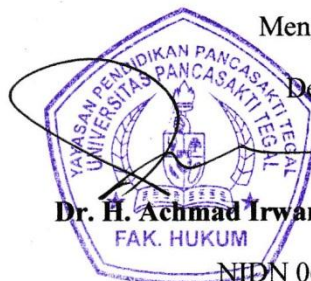
Pembimbing II

Dr.H. Nuridin, S.H., M.H.

NIDN 0610116002

Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 0615067604

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDHIKA PRASETYA SIRAIT
NPM : 5116500030
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 13 Juni 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PUTUSAN PERCERAIAN AGAMA KRISTEN
DI TINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI
INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN
PERKARA NOMOR 26/PDT.G/2019.PN.SLW)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak di buatkan oleh orang lain serta belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

Tegal,,.....

Yang Menyatakan

(Andnika Prasetya Sirait)

ABSTRAK

Ketika berbicara mengenai perceraian di dalam hukum gereja, maka warga gereja akan mengalami kesulitan, karena gereja tidak mengatur mengenai perceraian, meskipun pada kenyataannya banyak juga warga gereja yang bercerai secara hukum, tapi bagi warga gereja yang benar-benar mengimani.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui putusan perceraian bagi pemeluk Agama Kristen ditinjau dari Hukum Perdata Pada putusan Perkara Nomer 26/Pdt.G/2019/Pengadilan Negeri Slawi, (2) Untuk mengetahui dasar sahnya perceraian dalam Hukum Perdata terhadap perceraian yang beragama Kristen.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Studi kasus putusan perkara nomer 26/Pdt.G/2019/PN.Slw penelitian lapangan adalah penelitian yang menggunakan data primer. Sumber datanya dapat diperoleh melalui observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan ada sebuah dasar hukum yang menjadi sahnya perceraian tersebut

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi berumah tangga supaya menjadi masukan bagi mahasiswa, orangtua dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan sekitar

Kata Kunci : Perceraian Kristen, Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

ABSTRACT

When talking about divorce in church law, church citizens will have difficulties, Because the church does not govern divorce, although in fact many church citizens are legally divorced, but for the Church of the people who truly are in control.

This research aims to: (1) to know the ruling on divorce for adherants of Christianity is reviewed from the civil Law on the ruling number 26/PDT. G/2019/Slawi District Court, (2) to know the basis of the divorce in the civil law against a Christian divorce.

The type of research used in this thesis is a case study ruling of number 26/PDT. G/2019/PN. SLW field Research is a study using primary data. Data sources can be obtained through observation, and interviews.

The results of this research show that divorce can occur because there is a legal basis for which the divorce is valid.

Based on the results of the study is expected to be a study for the home to be input for students, Parents and all needy parties in the surrounding.

Keywords : Christian divorce, Law In Force In Indonesia

MOTTO

- ❖ Tetaplah berkomitmen pada keputusan yang anda buat, tapi berlakulah fleksibel untuk mencapainya (Tony Robbins)
- ❖ Anda tidak dapat memenangkan hidup jika kalah dengan pikiran Anda sendiri, ubahlah cara berpikir Anda, maka hidup Anda akan berubah (Tony Gaskins)
- ❖ Jika kamu tidak dapat berhenti memikirkannya, maka bekerja keraslah untuk mendapatkannya (Michael Jordan)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.. Kami Ucapkan atas selesainya sebuah karya kecilku yang penuh aku Perjuangkan. Hasil Perjuanganku belum seberapa ini dan bahkan tidak sebanding dengan perjuangan dan kerja keras kedua orangtuaku untuk memenuhi kebutuhan dan keperluanku. Namun dengan persembahan karya kecil ini akan sedikit membantu meringankan beban mereka dan membuat mereka tersenyum bangga dan bisa mengobati rasa lelah mereka.

Karya Kecilku ini ku persembahkan Kepada Mereka :

- ❖ Terimakasih Untuk Bapak Irianto Sirait dan ibuku Mesia Helmina Tumanggor tercinta yang telah memberikan Do'a serta motivasi yang tiada henti untuk Saya
- ❖ Terimakasih Adiku sayang Dewi Sartika Anjani Sirait dan Ulyarta veronica Sirait Sudah mau untuk membantu menghiburku
- ❖ Terimakasih Keluargaku yang selalu bertanya “kapan Wisuda dan Cepat Selesaikan ?” sehingga bisa jadikan alasan untuk selalu semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
- ❖ Terimakasih untuk Irmayatun Nadila sudah mau menemani sampai pagi membuat Skripsi Ini
- ❖ Terimakasih Pihak Pengadilan Negeri Slawi yang membolehkan untuk meneliti kasus Perkara Ini

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya bersyukur skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Pancasakti Tegal Dr. Burhan Eko Purwanto MHum
2. Dekan Fakultas Hukum Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
3. Wakil Dekan I Kanti Rahayu, S.H., M.H
4. Wakil Dekan II Dr. H. Sanusi, SH., MH
5. Wakil Dekan III Imam Asmarudin, SH., MH
6. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H
7. Dosen Pembimbing I Dr. Mukhidin, S.H., M.H dan Dosen Pembimbing II Dr. Nuridin, S.H., M.H.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai amal
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dan menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya Saya ucapkan Terimakasih.

Tegal,.....

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andhika Prasetya Sirait', with a long horizontal stroke extending to the left.

Andhika Prasetya Sirait

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER) ...	i
LEMBAR BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
1. Implikasi Perceraian Pasangan Suami Istri bagi Pemeluk Agama Kristen	7
2. Putusan Perkawinan karena Perceraian.....	8
F. METODE PENELITIAN.....	9
G. JADWAL PENELITIAN	11

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

A. PENGERTIAN PEKAWINAN	12
1. Pengertian Hukum Perkawinan di Indonesia	12
2. Asas Perkawinan	13
3. Konsep Perkawinan Agama Kristen	14
4. Syarat-syarat Perkawinan di Indonesia	16
5. Tata Cara Perkawinan	18
6. Pra Pernikahan	18
7. Hukum yang Mengatur Perkawinan.....	20
B. POLIGAMI	21
C. MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANG	23

D. TINJAUAN PERCERAIAN	26
1. Pengertian Perceraian.....	26
2. Hukum yang Mengatur Perceraian.....	27
E. PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM GEREJA BAGI PERKAWINAN KRISTEN INDONESIA	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. HASIL PENELITIAN.....	39
B. PEMBAHASAN	56
1. Putusan Perceraian bagi Pemeluk Agama Kristen di Tinjau dari Hukum Perdata pada Putusan Perkara Nomor 26/PDT.G/2019/PN/SLW	56
2. Dasar Sahnya Perceraian dalam Hukum Perdata terhadap Perceraian yang Beragama Kristen	57
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Manusia oleh Tuhan diberi karunia rasa saling mencintai, mempunyai akal budi dan menganut agama dan kepercayaan, serta taat terhadap hukum. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka.¹

Pengertian perkawinan menurut agama Kristen secara doktriner, di ambil dari dua bahan, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru dalam perjanjian lama, perkawinan diartikan sebagai gambaran dan tiruan dari bimbingan Tuhan. Suami-istri menampakkan dan menghadiahkan cinta kasih Tuhan dalam hidup cinta mereka. Di dalam perjanjian baru, pernikahan seseorang Kristen diartikan sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan dan mewujudkan hubungan cinta kristus dengan gerejanya²

¹ Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm. 1.

² Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm 26-27.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah yang berlaku adalah menurut Undang-Undang ini, namun, hal penting yang perlu diketahui adalah dari berbagai pandangan sahnya perkawinan menurut pandangan, seperti diuraikan di atas, terdapat kesamaan persepsi bahwa unsur agama merupakan hal yang utama dalam sahnya perkawinan.

Tidak ada seorangpun yang ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi, sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan untuk kebaikan bersama.³

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut jika ada perkawinan juga ada perceraian dan jika ada perceraian maka pasti ada persoalan lain dari meningkatnya angka perceraian, mengapa pemerintah relatif mempermudah terjadinya perceraian. oleh karena itu sering sekali kehidupan pasangan suami-istri yang sedikit bermasalah mengatasnamakan sebuah pasal untuk bercerai.⁴

Beda halnya dengan penyelesaian problematika dengan perdamaian, dimana masyarakat masih menganggap bersifat privat dan tabu, sehingga tidak perlu campur tangan siapapun, Sedangkan masyarakat yang rendah

³ H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 12.

⁴ Sonya Rosely, et al., *Putusnya Perkawinan Karena Perceraia*, Jurnal Hukum, 2017, hlm. 2.

ekonomi dan pendidikannya relatif menyelesaikan problematika perkawinan dibawah tangan/secara sirri. faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut adalah pekerjaan tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa,tidak ada tanggung jawab,ekonomi,pernikahan dini, penganiayaan, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, perselisihan, pertengkaran dan tidak ada keharmonisan.

Putusnya perkawinan dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan pada pasal 38 dan 39 Undang-Undang 1 Tahun 1974 putusnya perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.⁵

Sebagaimana Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 yang di rubah menjadi Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 dilengkapi pada

⁵Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta, 2000, hlm 12-13

Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 dan yang tercantum pada Pasal 19 :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pembedat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah di sembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶

Tata cara pengajuan gugatan perceraian berpedoman kepada *Herizen Inlandesch Reglement* (H.I.R) :

Pada pasal 118 Ayat (1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum

⁶ R.Subekti, et al., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013, Cet. Ke-41, hlm. 617-618

siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.⁷

Sebagaimana tersimpul dalam topik yang akan dibahas adalah perceraian pasangan suami-istri Kristen dan problematikanya.

Ketika berbicara mengenai perceraian di dalam hukum gereja, maka warga gereja akan mengalami kesulitan, karena gereja tidak mengatur mengenai perceraian, meskipun pada kenyataannya banyak juga warga gereja yang bercerai secara hukum, tapi bagi warga gereja yang benar-benar mengimani dan melaksanakan ajaran Kristus yang diyakini sebagai Sang Raja Gereja, maka akan sulit jika menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya, sekalipun terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, maupun telah terjadi pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama. Pasangan suami-isteri tidak ada yang menginginkan perkawinannya gagal. Setiap orang mengharapkan perkawinannya senantiasa diwarnai cinta kasih, kebahagiaan dan kesetiaan, serta langgeng, “sampai maut memisahkan.” Apalagi, prinsip iman Kristen mengenai pernikahan adalah monogami (satu pasangan), “fidelitas” (kesetiaan), dan “indisolubilitas” (tak tercerai), sering berhadapan dengan kenyataan yang berbeda, yakni ada alasan-alasan yang membuat pasangan tersebut menghadapi perkawinan yang mereka perjuangkan ternyata tidak berjalan sebagaimana yang mereka cita-citakan sebelumnya dan sampai pada kenyataan untuk mengakhiri perkawinan dengan

⁷ R.Soesilo, *RIB/HIR*, Bogor: PT karya nusantara, 1989, hlm 76-77

perceraian. Terdapat kontradiksi dalam hal perceraian antara Undang-undang perkawinan dan ketentuan hukum agama Kristen. Undang-undang Perkawinan Pasal 39, 40, 41 mengatur dan membolehkan adanya perceraian, namun pada prinsipnya, di dalam ketentuan hukum gereja, yang tertulis dalam Kitab Matius 19:5-6 yang menyatakan bahwa laki-laki yang telah bersatu dengan isterinya, menjadi satu daging dan apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia⁸, tetapi Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.

B. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana putusan perceraian bagi pemeluk Agama Kristen ditinjau dari Hukum Perdata pada putusan Perkara Nomer 26/Pdt.G/2019/Pengadilan Negeri Slawi?
- 2) Apakah dasar sahnya perceraian dalam Hukum Perdata terhadap perceraian yang beragama kristen ?

⁸ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia, 2004, hlm. 153.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

- 1) Untuk mengetahui putusan perceraian bagi pemeluk Agama Kristen ditinjau dari Hukum Perdata Pada putusan Perkara Nomer 26/Pdt.G/2019/Pengadilan Negeri Slawi?
- 2) Untuk mengetahui dasar sahnya perceraian dalam Hukum Perdata terhadap perceraian yang beragama kristen ?

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi Pribadi/ individu (peneliti):

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui cara-cara prosedur perceraian Agama Kristen.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini karya-karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Rita M M Simanungkalit mahasiswi Universitas Indonesia jurusan Hukum perdata Pada Tahun Dalam 2008 yang berjudul “Implikasi Perceraian Pasangan Suami Istri Bagi Pemeluk Agama Kristen Dan Katholik Pengadilan Negeri”. Dalam

penelitian tersebut membahas tentang Implikasi Perceraian Pasangan Suami Istri Bagi Pemeluk Agama Kristen Dan Katholik persamaan penelitian tersebut dengan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang perceraian bagi pemeluk Agama Kristen. Sedangkan perbedaan adalah bahwa peneliti tersebut membahas tentang implikasi Perceraian Pasangan suami-istri Bagi Pemeluk Agama Kristen Dan Katholik Permasalahan ini terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sedangkan penelitian penulis Putusan Perceraian Agama Kristen Di Tinjau Dari Hukum Perkawinan Indonesia {Studi Kasus Putusan Perkara Nomer 26/Pdt.G/2019/PN SLW)⁹

2. Skripsi yang di tulis oleh Sonya Rosely mahasiswi Universitas Brawijaya Malang jurusan Hukum perdata Pada Tahun Dalam 20015 yang berjudul “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Indonesia)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Indonesia), persamaan penelitian tersebut dengan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang perceraian bagi pemeluk Agama Kristen. Sedangkan perbedaan adalah bahwa peneliti tersebut membahas tentang Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi

⁹ Rita M M Simanungkalit, *Implikasi Perceraian Pasangan Suami Istri Bagi Pemeluk Agama Kristen Dan Katholik Pengadilan Negeri, Yogyakarta*, 2008, hlm 8-9

Perkawinan Kristen Indonesia), Sedangkan penelitian penulis Putusan Perceraian Agama Kristen Di Tinjau Dari Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Kasus Putusan Perkara Nomer 26/Pdt.G/2019/PN SLW)¹⁰

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi penulis disini menggunakan jenis penelitian normatife, yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatife (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku)

2. Pendektan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Studi kasus putusan perkara nomer 26/Pdt.G/2019/PN.Slw (field research) adalah penelitian yang menggunakan data primer. Sumber datanya dapat diperoleh melalui observasi, dan wawancara.

3. Sumber data

Penelitian hukum terdiri dari beberapa sumber-sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder, dengan uraian sebagai berikut:

1) Data Primer

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3-7

Data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan dan keputusan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.¹¹

2) Data Sekunder

Data skunder adalah data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data skunder adalah untuk mendukung data primer. Data skunder yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang
- b) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- c) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian
- d) Infomasi yang dikutip dari internet

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian, kemudian diolah dan diperikasa, lalu dipilih dan dilakukan editing serta coding berdasarkan urutan pokok bahasan.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi terhadap elemen penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa putusan perceraian Pengadilan negeri Slawi.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.151

G. Jadwal Penelitian

Persiapan Penelitian	20 Hari
Pengumpulan Bahan Penelitian	20 Hari
Pelaksanaan Penelitian	25 Hari
Pelaksanaan Penelitian	25 Hari
Total	90 Hari

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian hukum perkawinan di Indonesia

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pengertian dari perkawinan yaitu:

- a. Suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami.¹²
- b. Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.”¹³ Adapun mengenai asas menurut undang undang perkawinan:

¹² Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*, PT Tintamas, Jakarta, 1970, hlm.12

¹³ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, P.T dian Rakyat, Jakarta ,1986 hlm.19

2. Asas Perkawinan

Asas Perkawinan di dalam perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Ketentuan-ketentuan yang menjadi asas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Monogami Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

- d. Pendewasaan Usia perkawinan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
 - e. Mempersukar Perceraian Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
 - f. Kedudukan Suami Isteri Seimbang Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri¹⁴.
3. Konsep Perkawinan Agama Keristen

Nama lain dari agama Kristen ialah Protestan. Di dalam agama Kristen, terdapat banyak aliran teologi. Dari aliran tersebut menimbulkan suatu otoritas tersendiri bagi setiap gereja, sehingga berdampak pada sulitnya mencari dan menemukan hukum perkawinan (khususnya) yang dapat diberlakukan bagi setiap gereja Kristen (Protestan). Dalam agama Kristen, istilah perkawinan disebut juga pernikahan atau nikah. Mereka

¹⁴ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm.58-59

memandang bahwa nikah itu suatu ketetapan Allah.¹⁵ Hal ini berdasarkan pada kesaksian Alkitab pada Kejadian 2 ayat 24 dan Matius 19 ayat 3. Menurut Dr. J.L.Ch. Abineno, nikah mempunyai aspek kembar. Pada satu pihak ia adalah suatu hubungan (antara suami dan istri yang diatur dan disahkan oleh hukum). Pada pihak lain ia adalah suatu hubungan yang didasarkan atas penetapan atau peraturan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18, yaitu “Tidak baik, kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia”¹⁶ Ayat tersebut memberikan jawaban berupa alasan Tuhan dalam menetapkan pernikahan, yaitu :

- a. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja
- b. Manusia memerlukan seorang penolong yang sepadan dengan dia

Menurut agama ini, Tuhan menghendaki pernikahan sebagai suatu persekutuan hidup. Persekutuan dalam kasih Tuhan, dalam menghayati berkat pernikahan dan dalam menunjukkan perhatian pada pekerjaan masing-masing. Dalam Perjanjian Baru (Matius 19: 5 dan 6) terdapat ajaran Tuhan Yesus tentang perkawinan, yaitu :

- a. ayat 5 : Sebab itu laki – laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
- b. ayat 6: Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.

¹⁵O.S, Eoh, *Op.Cit.*, hlm 113.

¹⁶ *Alkitab, Op.Cit.*, hlm. 2.

- c. Dapat dilihat bahwa dalam ajaran agama ini sangat menekankan akan kekekalan perkawinan, dan hanya mautlah yang memisahkan mereka. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya kuasa dosa yang menyebabkan terjadinya perceraian di hadapan hukum. Menurut Dr. Fridolin Ukur, bahwa walaupun Gereja Protestan menganggap perceraian itu sebagai kesalahan, namun mengakui kenyataan tersebut dan tidak menutup kemungkinan bagi awal perkawinan baru¹⁷. tujuan pernikahan ada 3 rangkap, yaitu :
- 1) Melahirkan anak – anak dan mendidik mereka dalam penyembahan kepada Tuhan
 - 2) Kesetian suami dan istri, satu sama lain
 - 3) Karakter pernikahan tidak dapat dibatalkan, yaitu karena ini mencirikan persatuan yang tidak dapat diceraikan antara Kristus dan gereja¹⁸.
- d. Secara umum, suatu kehidupan dengan tujuan kebahagiaan merupakan tujuan dari pernikahan Kristiani yang Allah ciptakan dengan maksud manusia dipersiapkan untuk benar – benar menjadi manusia yang seutuhnya.
4. Syarat – syarat untuk Perkawinan di Indonesia UU No 1 tahun 1974
- Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. 1 tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai

¹⁷O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1996), hlm. 113.

¹⁸James F. White, *Pengantar Ibadah Kristen*, cet. ke-1 (Jakarta : Gunung Mulia, 2002), hlm. 289.

syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. 1 tahun 1974 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

5. Tata cara Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 10 dan 11 tentang Peraturan Pelaksanaan No. 9 tahun 1975 ayat(2), yang pokoknya bahwa Tata Cara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Begitu banyak pasangan Kristen membuka diri terhadap saran-saran tentang prosedur pernikahan mereka, sehingga menjadikan suatu pernikahan adalah tindakan ibadah Kristen yang paling indah. Pernikahan merupakan bentuk cinta kasih yang sedang matang. Pernikahan pada dasarnya terdiri dari kontrak (contract) umum yang disepakati secara bebas dan bersama-sama di hadapan para saksi.¹⁹

6. Pra Pernikahan

Pada sesi awal ini, *konseling* merupakan proses awal yang harus dilewati oleh setiap calon pasangan. Jadwal mereka akan diatur untuk dapat face to face dengan pendeta yang sifatnya pribadi. Hal ini dilakukan agar calon pasangan telah mantab untuk mengikat janji suci di hadapan Tuhan. Dalam sesi ini, pendeta harus melakukan 3 hal, yaitu :

- a. Berbicara tentang Tuhan memberitahukan cara membangun sebuah keluarga Kristen yang akan Allah berkati selamanya.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 289.

- b. Memberitahukan untuk menemui seorang dokter sebelum menikah. Hal ini berbicara tentang keintiman mereka sebagai sepasang suami – istri yang bertanggung jawab.
- c. Memberitahukan untuk tidak seharusnya seorang pasangan memiliki anak dengan segera setelah menikah²⁰.

Tentang persiapan, menjadi perhatian khusus bahwa semua yang berhubungan dengan pernikahan harus ditekankan dan mengekspresikan nuansa Kristen. Format dari Ibadah Pernikahan yaitu:

- a. Setelah lilin menyala dan orang tua wanita duduk, pendeta yang diikuti pengantin pria dan orang yang terbaik memasuki ruangan menuju tengah kapel dengan iringan mars pernikahan.
- b. Pengiring pengantin, pembawa cincin dan mereka yang terlibat mengambil tempatnya masing-masing.
- c. Pengantin wanita masuk didampingi seseorang (khususnya ayah) yang akan menyerahkan dirinya kepada pengantin pria.
- d. Pendeta menyampaikan kotbah sebagai pembukaan.
- e. Sang ayah menyerahkan putrinya kepada pengantin pria setelah menjawab atas pertanyaan dari pendeta.
- f. Lalu ayah duduk di samping istrinya. Pendeta dan pasangan pengantin melakukan pertanyaan dan pernyataan atas kesediaan dan janji yang

²⁰ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama – Agama*, cet. ke-1 (Semarang : Walisongo Press, 2009), hlm. 126

kudus dalam ikatan pernikahan. Hingga acara tukar cincin diikuti pernyataan setiap calon pengantin untuk menerima pasangannya.

- g. Pendeta berdoa, sebuah doa yang telah ditempatkan Allah di dalam hatinya, Ketika upacara pernikahan berlangsung, hasil dari persiapan pernikahan harus terasa. Jemaat harus merasakan bahwa mereka telah menjadi bagian Gereja, khususnya pasangan pengantin dan keluarga.²¹

7. Hukum yang Mengatur Perkawinan

Dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, diatur tentang sahnya suatu perkawinan, yaitu:

- a. Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama/Kepercayaannya.
- b. Ayat (2) Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dari sini timbul pertanyaan, apakah harus terpenuhi kedua ayat tersebut untuk memenuhi sahnya perkawinan Dalam Ordonansi Perkawinan Indonesia–Kristen tentang Pemberitahuan dan Pengukuhan Perkawinan pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa “Semua orang yang akan kawin harus memberitahukan niatnya itu kepada Pegawai Catatan Sipil atau kepada Penuntun Agama dalam wilayah salah satu pihak yang akan kawin bertempat tinggal”²² Dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa setiap perkawinan harus dicatat terlebih dahulu di Catatn Sipil, kemudian diproses sesuai agama/kepercayaan masing-masing. Perbuatan pencatatan

²¹ *Ibid.*, hlm. 126.

²² *Ibid.*, Cet. ke-7, hlm.215.

itu semata – mata bersifat administratif. Perkawinan Gerejani sangat penting bagi umatnya, tetapi tidak mempunyai akibat hukum dalam perkawinan, dan dalam Undang - undang ditentukan bahwa perkawinan Gerejani hanya boleh dilaksanakan sesudah perkawinan dihadapan pegawai Catatan Sipil (Pasal 81 KUHPerdara).²³ Menjadi catatan penting, bahwa yang dilaksanakan gereja bukanlah menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun “meneguhkan dan memberkati” suatu perkawinan yang sudah disahkan oleh negara dihadapan hukum (dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil). Dalam SK Mendagri No. 97 tahun 1978²⁴, bahwa pemerintah mengangkat pemuka agama (pendeta/pastor) untuk bertindak atas nama pemerintah, dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

B. Poligami

Dalam Antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan)²⁵ Dalam ajaran Kristen ditegaskan bahwa praktik poligami itu dilarang. Hal ini mengacu pada Alkitab, Perjanjian Lama yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan satu pria (Adam) dan satu wanita (Hawa) untuk melahirkan keturunan. Namun, Alkitab juga tidak

²³ Komariah, *Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Malang : UMM Press, 2010), hlm. 40.

²⁴ Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang – undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, cet. ke-1 (Jakarta : Gunung Mulia, 1994), hlm. 17

²⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>

menafsirkan bahwa telah adanya praktik poligami yang dilakukan tokoh Kristiani. Adanya poligami dicatat dimulai dari anak Kain, Lamech. Kain adalah anak Adam yang berdosa membunuh Habel saudaranya.²⁶ Dari sinilah penyimpangan (praktek) poligami terjadi sejalan dengan penolakan manusia akan titah Tuhan. Dan pada zaman sekarang, banyak gereja yang memberikan kelonggaran poligami berdasarkan kitab – kitab kuno agama Yahudi.

Indonesia termasuk negara yang mengakui beraneka ragam agama, yakni Agama Islam, Agama Kristen Protestan, Agama Kristen Katolik, Agama Hindu, Agama Buddha dan Agama Konghucu. Keseluruhan agama tersebut memiliki aturan sendiri baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk mengenai perkawinan dan perceraian. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut tentu saja memiliki perbedaan. Sah berarti menurut hukum yang berlaku. Jika perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Kalau perkawinan tidak menurut aturan hukum agama berarti perkawinan tidak sah menurut agama. Begitu pula dengan perkawinan yang tidak sesuai dengan tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat. Jadi, hal mengenai sahnya perkawinan bisa menurut peraturan perundang-undangan, menurut hukum adat dan menurut hukum agamanya, berikut pandangan sahnya suatu perkawinan dari ketiga sudut pandang tersebut diatas:

²⁶http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1958:pandangan-alkitab-mengenai-poligami&catid=98:theology&Itemid=99

1. Menurut hukum agama Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, Konghucu.
2. Menurut hukum adat Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan, maksudnya adalah jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sah menurut hukum adat kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui oleh pemerintah, hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan

C. Menurut ketentuan perundang-undangan

1. Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama calon suami/istri.
2. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU yang sama dikatakan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini berguna untuk mendapatkan akta nikah yang nantinya digunakan sebagai

pembuktian dan sebagai dasar hukum yang kuat untuk perbuatan hukum di masa yang akan datang, seperti kelahiran, pewarisan.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah yang berlaku adalah menurut Undang-undang ini, namun, hal penting yang perlu diketahui adalah dari berbagai pandangan sahnya perkawinan menurut pandangan, seperti diuraikan di atas, terdapat kesamaan persepsi bahwa unsur agama merupakan hal yang utama dalam sahnya perkawinan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan pelaksanaanya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Perkawinan, ketika kedua peraturan tentang perkawinan tersebut diberlakukan, berarti keanekaragaman hukum perkawinan yang selama ini menjadi pedoman dan berlaku bagi berbagai golongan warga negara dalam masyarakat dan dalam berbagai daerah dapat diakhiri karena peraturan tersebut berlaku sebagai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sebagai hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan sebagai hukum untuk mengatur perkawinan secara nasional yang berlaku bagi setiap warga negara, namun mengenai sahnya perkawinan, terdapat perbedaan antara undang- undang perkawinan dan ketentuan hukum gereja. Undang-undang Perkawinan memandang bahwa perkawinan sah, apabila sah menurut agama dan kepercayaannya itu, sedangkan agama Kristen memandang perkawinan berada dalam wilayah negara, bukan

gereja, oleh karena itu, gereja memberikan peneguhan dan pemberkatan perkawinan yang sudah disahkan oleh negara terlebih dahulu, sehingga gereja tidak memberikan pengesahan perkawinan.

Menurut Pdt. Eka Darmaputera, Pendeta Gereja Kristen Indonesia: Perkawinan sah, apabila sah menurut hukum nasional, karena seharusnya gereja tidak memberikan pengesahan perkawinan, tapi gereja melakukan pemberkatan dan meneguhkan perkawinan warganya, yang sudah terlebih dahulu disahkan oleh negara. Hal inilah yang membuat gereja-gereja Protestan di Indonesia mengalami kesulitan yang mendasar, sehubungan dengan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang memang sudah kontroversial sejak awal kelahirannya. Sebab, di satu pihak Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan harus sah terlebih dahulu menurut agama yang dianut, setelah itu dicatat oleh negara di kantor catatan sipil setempat, namun ajaran Kristen Protestan mengatur yang sebaliknya, perkawinan harus sah lebih dahulu di depan negara, baru gereja dapat memberikan pemberkatan dan memberikan peneguhan, karena tidak mungkin bagi gereja memberikan pemberkatan pada perkawinan yang belum sah atau memberikan peneguhan pada perkawinan yang belum ada secara resmi. Apalagi untuk memberikan pengesahan lebih tidak mungkin, karena gereja bukan merupakan lembaga hukum juga bukan merupakan lembaga negara, tetapi gereja adalah lembaga keagamaan, jika gereja memberikan pengesahan pada perkawinan, berarti gereja telah merampas hak dan otoritas negara,

dan akan menjadi lebih pelik, bila konsekuensi dari memberikan pengesahan tersebut, gereja juga memberikan pengesahan pada perceraian”²⁷

D. Tinjauan Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).²⁸, Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali didalam Undang-Undang perkawinan. Bahkan yang terjadi justru terjadi sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. beberapa sarjana memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain :

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu²⁹

Jika diartikan secara sederhana, perceraian dalam Kristen merupakan

²⁷ Eka Darmaputera, Trilogi Perkawinan

Kristen, <http://www.glorianet.org/ekadarmaputera/ekadtril.html>, diakses 18 September 2015.

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997, hlm. 185.

²⁹ R. Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

berakhirnya ikatan pernikahan yang sudah seharusnya seumur hidup tersebut. Perceraian tidak hanya berakhirnya hubungan diantara dua belah pihak, namun juga aspek yang luas yakni anak, harta benda, lembaga gereja, perintah dan tentunya Allah. Semua yang terlibat di dalam pernikahan tersebut juga harus menanggung akibatnya sebab perceraian akan melibatkan banyak aspek yang akhirnya akan menimbulkan konflik berkepanjangan sampai akhirnya menuju ke kehancuran secara langsung ataupun tidak langsung.³⁰

2. Hukum yang mengatur perceraian

Menurut Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 Tentang putusnya perkawinan, Sebagai berikut :

a. Pasal 39

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

b. Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan

³⁰<http://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-pengertian-dampak.html/>

(2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

c. Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perelisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

E. putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di Indonesia

Pada Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) Dasar pernikahan Kristen tertuang dalam Alkitab, yaitu di dalam:

- a) Matius 19:5-6 pada intinya mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia, karena setelah perkawinan laki-laki dan perempuan akan menjadi satu daging

- b) Korintus 7:39 pada intinya mengatakan bahwa seorang isteri terikat selama suaminya masih hidup
- c) Roma 7:2 pada intinya mengatakan bahwa seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu masih hidup
- d) Kejadian 2:24 pada intinya mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, dan keduanya menjadi satu daging
- e) Markus 10:9. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan harus berlangsung terus selama suami dan istri masih hidup. Dengan demikian, orang Kristen seharusnya tidak bercerai secara Agama.

Ketika berbicara mengenai perceraian di dalam hukum gereja, maka warga gereja akan mengalami kesulitan, karena gereja tidak mengatur mengenai perceraian, meskipun pada kenyataannya banyak juga warga gereja yang bercerai secara hukum, tapi bagi warga gereja yang benar-benar mengimani dan melaksanakan ajaran Kristus yang diyakini sebagai Sang Raja Gereja, maka akan sulit jika menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya, sekalipun terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, maupun telah terjadi pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama. Pasangan suami-isteri tidak ada yang menginginkan perkawinannya gagal. Setiap orang mengharapkan perkawinannya senantiasa diwarnai cinta kasih, kebahagiaan dan kesetiaan, serta langgeng, “sampai maut memisahkan.” Apalagi, prinsip iman Kristen mengenai pernikahan adalah monogami (satu pasangan).

Putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum Gereja bagi perkawinan Kristendi Indonesia yang digunakan adalah analisis bahan hukum kualitatif yang dilakukan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Pembahasan sebagai berikut:

1. Keabsahan putusan perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum gereja bagi perkawinan Kristen di Indonesia harapan setiap orang tidak ada yang ketika memasuki kehidupan perkawinannya, menghadapi situasi bercerai dengan pasangan yang bakal dinikahnya, pada umumnya setiap orang mengharapkan sebuah perkawinan yang diwarnai dengan cinta kasih dan kesetiaan, serta langgeng, “sampai maut memisahkan.” Idealisme semacam ini sering harus berhadapan dan bahkan benturan dengan kenyataan tragis bahwa perkawinan mereka harus mengalami perceraian, berhadapan dengan benturan antara idealisme dan realisme khususnya pada perkawinan kristiani ini, diperlukan sebuah sikap yang sekaligus teologis dan etis. Secara hukum negara, perceraian bagi pemeluk agama Kristen tersebut, jika gugatan perceraianya sudah diputus oleh hakim adalah sah secara hukum negara, namun perceraian secara hukum gereja yang tidak mengatur bahkan menolak perceraian akan terjadi ketidak pastian. Bagi gereja-gereja yang tidak mengatur dan tidak mengakui adanya perceraian tersebut, maka akan timbul ketidakpastian secara hukum gereja mengenai status pasangan yang telah bercerai, di Buku Induk gereja mereka tetap tercatat sebagai suami-isteri, karena tidak ada catatan

buku perceraian, sehingga akan timbul kesulitan jika pasangan tersebut akan menikah kembali, bagaimana gereja akan memberkati pernikahan yang kedua kali, jika perceraian mereka tidak diakui dan tidak dicatat. Perbedaan prinsip antara hukum nasional dan hukum gereja tersebut, maka Penulis menggunakan teori yang mengacu pada teori kepastian hukum, yaitu dimana hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Pendapat dari Soerjono Soekanto yang merujuk pada pendapat Lon Fuller, bahwa kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku dapat menciptakan suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat dicapai dalam situasi tertentu, yakni:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas dan konsisten.
- b. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten.
- c. Hakim-hakim yang tidak berpihak menerapkan aturan hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum. Demi mewujudkan kepastian hukum di atas, Perkawinan bagi pemeluk agama Kristen di Indonesia, dalam prakteknya telah menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal sahnya Perkawinan menurut ajaran Kristen Protestan yang harus sah terlebih dahulu menurut hukum negara, karena perkawinan berada

dalam ranah hukum negara, sedangkan Undang-undang Perkawinan menentukan sahnya perkawinan adalah jika sah menurut agama, jadi untuk mencapai kepastian hukum, gereja melakukan peneguhan dan pemberkatan nikah terlebih dahulu, baru dicatat di lembaga catatan Sipil. 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada public
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas system
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari

Berdasarkan teori kepastian hukum, maka perceraian bagi pernikahan Kristen di Indonesia adalah sah, asalkan perkawinannya memenuhi syarat perkawinan dan perceraianya memenuhi syarat perceraian yang diatur dalam hukum Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan berdasarkan Kitab Roma 13:1-7 dikatakan: “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan peroleh puji dari padanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlahkan dia, karena tidak percuma pemerintah menyangkal pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Perceraian memang cenderung menyebabkan stress, rasa tertekan, beban dan penderitaan bagi pelakunya yang sering sekaligus menjadi korbannya. Namun bagi sebagian Pendeta berpendapat terkadang perceraian adalah pilihan terbaik dan paling tepat

bagi sebuah keluarga yang senantiasa mengalami konflik berkepanjangan, tidak semua masalah yang timbul dalam rumah tangga dapat diperbaiki dan disembuhkan dengan kedewasaan suami-istri, maka tuntutan yang demikian sebenarnya tidak sesuai dengan realitas hubungan antar manusia dan tidak cukup peduli akan penderitaan orang. Perceraian juga terkadang baik bagi perkembangan anak-anak agar mereka, tidak menjalani hidup di tengah keluarga yang penuh dengan konflik orang tua mereka. Penilaian terhadap perceraian tergantung pada situasi konkret dalam keluarga karena tidak selalu hanya membawa akibat yang negatif. Sikap untuk menghindari situasi konflik yang terus-menerus melalui perceraian adalah jalan keluar untuk memperoleh ketenteraman diri, seperti dikatakan oleh Margaret Mead dalam buku tentang psikologi keluarga bahwa: “Setiap saat kita mendambakan kebahagiaan, rukun dengan anak-anak, tetapi kita mempunyai hak untuk mengakhiri suatu perkawinan bila mendatangkan bencana dan ketidak tenteraman”. Dalam penelitian ini, Penulis juga menggunakan teori keadilan, istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai

dengan hak dan kewajibannya. Jenis-jenis Keadilan Secara Umum ialah sebagai berikut:

1. Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu
2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hak yakni individu. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang menilai dari proporsionalitas ataupun kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan juga kecakapan
3. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) ialah suatu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi Undang-undang untuk kebaikan secara bersama ataupun banum commune
4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindictiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya
5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupasuatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan.

6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*) ialah suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi-pribadi dari suatu tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.

Dari bermacam-macam keadilan dari berbagai jenis tersebut, yang relevan digunakan dalam hal perceraian adalah keadilan protektif, dimana untuk memberikan suatu perlindungan bagi pihak yang dirugikan atas adanya perceraian tersebut, serta dari segi hak asasi manusia, larangan perceraian bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bertentangan. Usaha-usaha akan terus dilakukan untuk membuka cakrawala berpikir baru bagi warga GKI dan gereja lain dalam menghadapi dan menyikapi masalah perceraian sehingga sebab perceraian tidak disamaratakan pada satu aturan atau disiplin gereja saja, jika semua teks Perjanjian Baru yang berkaitan dengan fenomena perceraian ditafsirkan dengan tepat, mungkin perceraian dapat ditangani dengan lebih pragmatis, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi mereka yang bercerai, keadilan tersebut khususnya yang memenuhi teori kepantasan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, seorang filsuf yang hidup pada zaman renaissance yang menyatakan bahwa kebebasan para pihak, khususnya dalam perjanjian dimana para pihak bebas mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian yang disepakati asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, kepantasan, ketertiban umum. Hak untuk mengadakan perjanjian adalah hak asasi manusia, suatu kontrak

adalah sukarela dan merupakan kebebasan manusia yang fundamental³¹. Teori keadilan adalah persamaan perlakuan terhadap semua pihak sebagai suatu asas etis tidak selalu mencapai keadilan dan kelayakan. Persoalan dan kebutuhan dalam masyarakat sangat beraneka ragam sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang benar. Demikian pula suatu faktor khusus atau situasi tertentu dapat membuat persamaan yang ketat menjadi suatu perlakuan yang tidak adil. Dengan demikian terhadap suatu kelompok tertentu dan untuk suatu keadaan tertentu perlu diberikan perlakuan yang sama, namun terhadap suatu golongan lain dan berdasarkan suatu kondisi khusus yang berlainan mungkin perlu perlakuan yang tidak sama, untuk itu asas yang harus diperhatikan adalah asas keadilan yang juga merupakan salah satu makna keadilan. Asas keadilan mengacu pada suatu hal yang sepatutnya menurut pertimbangan moral atau nilai etis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat berdasarkan asas keadilan itu pula keadilan politik yang ketat kadang-kadang perlu diperlembut dengan tindakan pengampunan. Setiap petugas administrasi pemerintah maupun para pemimpin gereja yang ada perlu menanamkan asas keadilan dalam memutuskan masalah perceraian bagi perkawinan Kristiani, apakah melarang perceraian dengan membabi buta pada perkawinan yang dipenuhi kekerasan dalam rumah tangga atau perselisihan yang tidak dapat didamaikan pantas untuk

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 18-20.

dilakukan atau tidak. Bermula dari pengertian perkawinan tersebut maka kalangan Kristen Protestan tidak pernah menganjurkan perceraian, karena juga perceraian dilarang dalam Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius 19: 4–6, dalam hal perceraian sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, Gereja Kristen Protestan memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan Gereja Kristen katolik, dimana Gereja Kristen Protestan memang tidak pernah menganjurkan perceraian terjadi karena perceraian merupakan larangan, tetapi ketika perceraian sudah terjadi dan diputuskan oleh pengadilan Gereja Kristen Protestan dapat memahami bahwa perceraian dapat terjadi, tetapi dalam hal ini bukan berarti umat Kristen Protestan sejalan dengan alasan alasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi Gereja lebih memahami kepada pribadi atau pihak yang bersangkutan, dimana kehidupannya dapat menjadi lebih baik³².

Pada prinsipnya, tidak menutup kemungkinan gereja melakukan kesalahan, sama seperti akan selalu ada kemungkinan kesalahan untuk menolak perceraian, maupun untuk tidak melakukan pemberkatan dan peneguhan bagi pernikahan kembali. Namun, jika pun gereja melakukan kesalahan, maka ia seharusnya melakukan kesalahan karena berada di pihak anugerah, bukan di pihak penghakiman³³.

³² Sonya Rosely, *Op.Cit.*, hlm. 14.

³³ Craig S. Keener And Marries Another, *Divorce and Remarriage in the Teaching of the New Testament* (Peabody, MA: Hendrickson, 1991), hlm.66.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Bahwa dalam penelitian ini dengan pendekatan kasus (studi kasus) maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Slawi dalam perkara perceraian antara Biondi Widjang Narto Taruna sebagai penggugat Melawan Reneilda Piesesca Setiawan sebagai Tergugat yang keduanya beragama Kristen terdaftar perkara nomor 26/PDT.G/2019/PN.SLW dengan alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan Tergugat Telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 18 Maret 2017, bertempat di Gereja Pentakosta Pusat Surabaya Jemaat Batu Penjuru Margasari Kabupaten Tegal;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 16 Maret 2017, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3326-KW-20032017-0001 tanggal 20 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal bersama orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung , Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : GAVRIEL ALVARO, lahir di Tegal 15 Januari 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-08022018-0020;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan penuh keharmonisan layaknya pasangan suami istri yang mendmbakan kehidupan sejahtera sebagai tujuan hidup yang ingin diraih, namun seiring berjalannya waktu yakni sejak bulan Agustus 2017 hingga mempunyai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah timbul cobaan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi kian hari percekcoan lebih sering terjadi, namun Penggugat mencoba untuk bertahan karena Penggugat masih menyayangi anak hasil perkawinan tersebut;
6. Bahwa hal-hal yang memicu perselisihan, pertengkaran dan percekcoan terus menerus adalah Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang sah dan keluarga orang tua Penggugat, selain itu Tergugat selaku isteri terlalu berani dan sering membantah;
7. Bahwa mengingat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka sekitar bulan Januari 2019 hingga sekarang kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan hidup sendiri-sendiri, Penggugat memilih bertahan

tinggal bersama orang tuanya di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, sedang Tergugat bersama anaknya tinggal di rumah tantenya di Desa Karangjati Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membina keluarga sejahtera jelas tidak mungkin tercapai, karena itu perceraian jalan terbaik untuk berpisah;

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat bermaksud agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3328-KW-20032017-0001 tanggal 20 Maret 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya.
9. Bahwa mengingat anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni GAVRIEL ALVARO belum dewasa dan sekatang tinggal bersama Tergugat yang tentunya masih memerlukan bimbingan, pembinaan dan pendidikan dari orang tuanya, maka pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak tersebut yakni ibunya, namun demi menjaga kesejahteraan dan mental anak tersebut, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3328-KW-20032017-0001 tanggal 20 Maret 2017 putus karena perceraian dengan segala hukum akibatnya;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan hak asuh terhadap anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : GAVRIEL ALVARO, laki-laki, lahir di Tegal 15 Januari 2018 berada dibawah penugasan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Gugatan penggugat telah di sidangkan Majelis Hakim. Pemeriksa perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri ke depan persidangan sedangkan dari pihak Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut melalui Juru Sita yang menjalankan relaas panggilan sidang tertanggal 08 Juli 2019, dan relaas panggilan sidang tanggal 19 Juli 2019, adapun relaas panggilan sidang tersebut dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 390 ayat (3) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R)/* Pasal 718 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b. Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara majelis hakim tidak dapat menjalankan proses mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berpekara sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke Persidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk itu sehingga dengan demikian Proses pemeriksaan perkara dipersidangan

dilanjutkan sesuai hukumacara yang berlaku yaitu pembacaan surat gugatan oleh penggugat.

- c. Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selanjutnya membacakan surat gugatannya yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;
- d. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk mewakili Tergugat dalam menghadapi perkara juga tidak memberikan jawabannya ataupun mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian dalam perkara Tergugat tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menyangkal gugatan dari penggugat;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat menunjukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-E) NIK: 3328011911880001 atas Nama Biondi Widjang Narto Taruna, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P-1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektornik (KTP-E) NIK: 3209034703890007 atas nama Reneilda Piesesca, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P-2)

3. Fotokopi Akta Pernikahan tanggal 18 Maret 2017 atas nama biondi widhang Narto Taruna dan Reneilda Piesesca Setiawan, yang dikeluarkan oleh Johan Petrus Pongbulaan Pendeta Gereja pentakosta Pusat Surabaya Jemaat Pejuru Margasari Kabupaten Tegal. Untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P-3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomer 3328-KW-20032017-0001 tanggal 20 Maret 2017 atas nama Biondi Widjang Narto Taruna dan Reneilda Piesesca Setiawan, yang dikeluarkan oleh dinas Kependududukan dan PENCATATAN Sipil Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P-4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomer 3328-LU-08022018-0020 tanggal 8 febuari 2018 atas nama Gavriel Alvaro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P-5)
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat oleh Reneilda Piesesca Setiawan untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P-6)
7. Fotokopi kartu Keluarga (KK) Nomer : 3328011306170003 dikeluarkan tanggal 21 Maret 2018 atas nama Kepala Keluarga Biondi Widjang Narto Taruna, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda (bukti P-7)

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti mencocokkan dengan aslinya, untuk bukti P-2, dan P-5 berupa fotokopi dan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara;

Selain mengajukan 7 (tujuh) bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di Persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Agus Widjang Narto Bin Wiryo Taruno (alm)
 - a) Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini yaitu untuk dapat memberikan keterangan bahwa penggugat bermaksud untuk menggugat cerai istrinya yaitu tergugat
 - b) Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya jemaat Batu Penjuru Margasari, Kabupaten Tegal. Dengan disaksikan oleh keluarga dan kerabat penggugat dan tergugat
 - c) Bahwa sejak penggugat dan tergugat menikah telah tinggal bersama keluarga saksi sampai sebelum penggugat mengajukan gugatan cerai

- d) Bahwa selama pernikahannya penggugat dan tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Gavriel Alvaro
- e) Bahwa sebelumnya anak penggugat dan tergugat tinggal dirumah saksi bersama-sama dengan penggugat dan tergugat, namun sekarang anak dari penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat
- f) Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara penggugat dengan tergugat
- g) Bahwa penyebab pertengkaran tersebut diantaranya adalah soal anak, sampai tergugat tidak menghargai penggugat juga terhadap keluarga saksi

2) Daud Bin Jon Petrus Pongbulaan

- a) Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini yaitu untuk dapat memberikan keterangan bahwa penggugat bermaksud untuk menggugat cerai isterinya yaitu tergugat
- b) Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gavriel Alvaro
- c) Bahwa sejak penggugat dan tergugat menikah telah tinggal bersama keluarga penggugat sampai sebelum penggugat mengajukan gugatan cerai
- d) Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, dan saksi mengetahui tergugat pernah marah-marah kepada penggugat

e) Bahwa penyebab pertengkaran tersebut diantaranya adalah soal anak

yang keduanya menerangkan sebagai termuat dalam salinan penting

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana *posita* gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P=1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-7 diketahui kalau Penggugat beragama Kristen begitu juga dengan Tergugat sehingga sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan umum maka perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian a quo adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mensyaratkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”:

Menimbang, bahwa khusus terhadap gugatan perceraian atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, Majelis hakim diharapkan harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian antara suami isteri tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut tidak diperkenalkan untuk mengajukan gugatan perceraian menurut ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, Karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak Nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Perdata gugatan Perceraian dengan alasan adanya percecokan antara penggugat dengan tergugat yang pada mulanya pertengkaran tersebut masih bisa diselesaikan, akan tetapi dengan seiringnya waktu percecokan antara penggugat dan tergugat semakin sering terjadi dan tidak bisa lagi diselesaikan oleh penggugat dan tergugat maka sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut harus benar-benar berupaya untuk :

1. Secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak;
2. Dalam pemeriksaan dipersidangan harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan antara suami isteri;
3. Secara yuridis formil (kebenaran formal), Majelis Hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan perceraian tersebut;

4. Secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), Majelis Hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak principal didengar pula keterangannya secara langsung dipersidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

PERTIMBANGAN HAKIM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-1 (satu) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-2 (dua) dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) a quo Majelis Hakim akan memeriksa lebih dahulu terhadap keabsahan dari status perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 gugatan Penggugat a quo setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama maka sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987 memang mengharuskan agar sebuah perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri, akan tetapi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan yang dalam hal ini Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditujuka kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil dimana dikeluarkannya Akta Perkawinan tersebut dan dalam perkara a quo maka apabila putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap Penggugat ataupun Tergugat diwajibkan untuk melaporkan Putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat maka oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat sudah Majelis Hakim kabulkan sehingga dalam perkara a quo secara formil kedudukan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal 181 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/I Pasal 192 Reschtsregement voor de Buitengewesten (R.BG.) sangat beralasan hukum apabila dalam perkara a quo Tergugat juga dihukum untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo sehingga sangat relevan dan berdasarkan hukum apabila terhadap petitum ke-5 (lima) dari gugatan Penggugat a quo Majelis Hakim kabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 178 ayat (2) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/I Pasal 189 Reschtsregement voor de Buitengewesten (R.BG.), Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/I Pasal 149 Reschtsregement voor de Buitengewesten (R.BG.), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3328-KW-200320017-0001 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum yang tetap;
5. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : GRAVIEL ALVARO berada di bawah hak asuh Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;
6. Menetapkan Penggugat untuk memberikan hak nafkah hidup dan biaya pendidikan yang diperlukan anaknya yang secara teratur diberikan pada setiap bulan sampai dewasa atau sudah menikah;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

B. PEMBAHASAN

1. Putusan perceraian bagi pemeluk Agama Kristen ditinjau dari Hukum Perdata Pada putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.SLW

Menurut Putusan tersebut, bahwa perkawinan dapat putus karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yakni sejak bulan Agustus 2017 perselisihan tidak kunjung selesai, pada mulanya perselisihan tersebut dapat diselesaikan, akan tetapi seiring berjalannya waktu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi. Hal-hal yang memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang sah. Akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka pada sekitar bulan Januari 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan hidup sendiri-sendiri. Kemudian Penggugat memilih bertahan tinggal bersama orang tuanya di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, sedangkan Tergugat bersama anaknya tinggal di rumah tantenya di Desa Karangjati Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” , bahwa ikatan lahir dan

batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan perceraian dengan alasan adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang pada mulanya pertengkaran tersebut masih bisa diselesaikan, akan tetapi dengan seiringnya waktu percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan tidak bisa lagi diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f .

2. Dasar sahnya perceraian dalam Hukum Perdata terhadap perceraian yang beragama Kristen.

Menurut hukum perdata tersebut yang menjadi dasar Hukum adalah pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1975 Tentang Tatacara Perceraian yaitu Sebagai berikut:

- a) Salah satu Pihak berbuat zina atau menjadi pemabok,penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c) Salah satu pihak mendapat Hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e) Salah satu pihak Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Alkitab.sebagai berikut:

- a) Matius 19:5 adalah sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
- b) Matius 19-6 adalah demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia
- c) Matius 5:32 adalah setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali zinah dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina

- d) Korintus 7:39 pada intinya mengatakan bahwa seorang isteri terikat selama suaminya masih hidup
- e) Roma 7:2 pada intinya mengatakan bahwa seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu masih hidup
- f) Kejadian 2:24 pada intinya mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, dan keduanya menjadi satu daging
- g) Markus 10:9. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan harus berlangsung terus selama suami dan istri masih hidup. Dengan demikian, orang Kristen seharusnya tidak bercerai secara Agama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian yang beragama Kristen di tinjau dari hukum perkawinan Indonesia maka peneliti dapat ambil kesimpulan sebagai berikut :

- h) Berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.SLW, Meskipun para pihak atau Penggugat dan Tergugat beragama Kristen perkawinan dapat putus dikarenakan percecokan yang terus menerus tidak kunjung selesai sejak 2017 dan tidak dapat dirukunkan kembali
- i) Karena sebab itu adanya dasar Hukum pada Pasal 19 huruf F yang berbunyi Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.oleh sebab itu Pengadilan dapat memutuskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian yang beragama Kristen di tinjau dari hukum perkawinan Indonesia maka hal yang perlu disarankan oleh peneliti adalah sebagai berikut

- a) Bagi pasangan yang telah bercerai sebaiknya menjalin hubungan yang lebih kekeluargaan dan dapat dibicarakan tanpa adanya emosional antara kedua belah pihak, memulai hidup baru dengan tetap menjalin silaturahmi agar tidak ada rasa benci atau dendam yang terus menerus

karena jika itu terjadi kemungkinan suatu hal yang tidak diinginkan dapat terjadi karena benci dan dendam tersebut

- b) Sebaiknya pengasuhan anak dilakukan bersama walaupun sekarang tidak lagi menjadi pasangan suami dan isteri agar anak tidak hanya mendapatkan kasih sayang hanya dari satu pihak orang tua entah itu suami dan isteri

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama – Agama*, cet. ke-1, Semarang : Walisongo Press, 2009.

Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Craig S. Keener And Marries Another, *Divorce and Remarriage in the Teaching of the New Testament*, Peabody, MA: Hendrickson, 1991.

Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1990.

H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1982.

James F. White, *Pengantar Ibadah Kristen*, cet. ke-1, Jakarta: Gunung Mulia, 2002.

Komariah, *Hukum Perdata*, cet. ke-4, Malang: UMM Press, 2010.

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia, 2004.

O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1996.

Rita M M Simanungkalit, *Implikasi Perceraian Pasangan Suami Istri Bagi Pemeluk Agama Kristen Dan Katholik Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Yogyakarta, 2008.

R. Soesilo, *RIB/HIR*, Bandung : PT Karya Nusantara, 1989.

R. Subekti, et al., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Balai Pustaka, 2013.

R.Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta:Intermasa, 1985.

Sonya Rosely, et al., *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Bersadasrkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia,, Jurnal Hukum*, 2017.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997.

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.

Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang – undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, cet. ke-1, Jakarta : Gunung Mulia, 1994.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945.

Herizen Inlandsch Reglement (H.I.R) Tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Perceraian

Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer ! Tahun 1974

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer ! tahun 1974

Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPERDATA)

Website:

<http://www.sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-pengertian-dampak.html/.com>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia//.com>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami.com>

http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1958:pandangan-alkitab-mengenai-poligami&catid=98:theology&Itemid=99.com

PUTUSAN

No.mor 26/Pdt.G/2019/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BIONDI WIDJANG NARTO TARUNA, Umur 31 Tahun, Tempat & Tanggal Lahir Tegal, 19 November 1988, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Bisma RT. 001 RW. 001 Desa Margasari Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

RENEILDA PIESESCA SETIAWAN, Umur 30 Tahun, Tempat & Tanggal Lahir Cirebon, 07 Maret 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Bisma No. 82 RT. 001 RW. 001 Desa Margasari Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, sekarang bertempat tinggal di Desa Karangjati No. 8 RT. 07 RW. 02 Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan A.N. Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Slw. tanggal 05 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Slw. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Juli 2019;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Slw. tanggal 05 Juli 2019 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Telah membaca Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga telah mendengarkan keterangan dari Penggugat atas gugatan *a quo*;

Telah mendengarkan kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 05 Juli 2019 dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Slw., dengan ini mengajukan gugatan perceraian yaitu :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 18 Maret 2017, bertempat di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Batu Penjuru Margasari Kabupaten Tegal;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 18 Maret 2017, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3328-KW-20032017-0001 tanggal 20 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal bersama orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama :GAVRIEL ALVARO, lahir di Tegal 15 Januari 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-08022018-0020;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan penuh keharmonisan layaknya pasangan suami isteri yang mendambakan kehidupan sejahtera sebagai tujuan hidup yang ingin diraih, namun seiring berjalannya waktu yakni sejak bulan Agustus 2017 hingga mempunyai anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah timbul cobaan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada mula pertengkaran tersebut masih dapat diselesaikan, tetapi kian hari percekcoakan lebih sering terjadi, namun Penggugat mencoba untuk bertahan karena Penggugat masih menyayangi anak hasil perkawinan tersebut;
6. Bahwa hal-hal yang memicu perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan terus menerus adalah Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang sah dan keluarga orang

tua Penggugat, selain itu Tergugat selaku isteri terlau berani dan sering membantah;

7. Bahwa mengingat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka sekitar bulan Januari 2019 hingga sekarang kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan hidup sendiri-sendiri, Penggugat memilih bertahan tinggal bersama orang tuanya di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, sedang Tergugat bersama anaknya tinggal di rumah tantenya di Desa Karangjati Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membina keluarga sejahtera jelas tidak mungkin tercapai, karena itu perceraian jalan terbaik untuk berpisah;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat bermaksud agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3328-KW-20032017-0001 tanggal 20 Maret 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa mengingat anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni GAVRIEL ALVARO belum dewasa dan sekarang tinggal bersama Tergugat yang tentunya masih memerlukan bimbingan, pembinaan dan pendidikan dari orang tuanya, maka pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak tersebut yakni ibunya, namun demi menjaga kesejahteraan dan mental anak tersebut, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3328-KW-20032017-0001 tanggal 20 Maret 2017 putus karena perceraian dengan segala hukum akibatnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

- untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : GAVRIEL ALVARO, laki-laki, lahir di Tegal 15 Januari 2018 berada dibawah penguasaan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri ke depan persidangan sedangkan dari pihak Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut melalui Juru Sita yang menjalankan relaas panggilan sidang tertanggal 08 Juli 2019, dan relaas panggilan sidang tanggal 19 Juli 2019, adapun relaas panggilan sidang tersebut dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 390 ayat (3) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 718 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dapat menjalankan proses Mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkara sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk itu sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku yaitu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selanjutnya membacakan surat gugatannya yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk

mewakili Tergugat dalam menghadapi perkara *a quo* juga tidak memberikan jawabannya ataupun mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat selanjutnya dipersidangkan telah mengajukan bukti surat guna menguatkan dalil gugatannya yaitu dengan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e) NIK : 3328011911880001 atas nama Biondi Widjang Narto Taruna, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e) NIK: 3209034703890007 atas nama Reneilda Piesesca, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2;**
3. Fotokopi Akta Pernikahan tanggal 18 Maret 2017 atas nama Biondi Widhang Narto Taruna dan Reneilda Piesesca Setiawan, yang dikeluarkan oleh Johan Petrus Pongbulaan Pendeta Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat "Penjuru" Margasari Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3328-KW-20032017-0001 tanggal 20 Maret 2017 atas nama Biondi Widjang Narto Taruna dan Reneilda Piesesca Setiawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LU-08022018-0020 tanggal 8 Februari 2018 atas nama Gavriel Alvaro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5;**
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 26 Juni 2019, yang dibuat oleh Reneilda Piesesca Setiawan, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6;**
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3328011306170003 dikeluarkan tanggal 21 Maret 2018 atas nama Kepala Keluarga Biondi Widjang Narto Taruna, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya diberi tanda

Bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* mencocokkan dengan aslinya, untuk bukti P-2, dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **AGUS WIDJANG NARTO Bin WIRYO TARUNO (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu Penggugat merupakan anak kandung dari saksi dan untuk selebihnya saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan istri dari Penggugat dan saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini yaitu untuk dapat memberikan keterangan bahwa Penggugat bermaksud untuk menggugat cerai istrinya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya jemaat "Batu Penjuru" Margasari, Kabupaten Tegal. Dengan disaksikan oleh keluarga dan kerabat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah bujang dan Tergugat adalah gadis;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah telah tinggal bersama keluarga saksi sampai sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Gavriel Alvaro;
- Bahwa sebelumnya anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat, namun

sekarang anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

- ✓ • Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- ✗ • Bahwa penyebab pertengkaran tersebut diantaranya adalah soal anak, sampai Tergugat tidak menghargai Penggugat juga terhadap keluarga saksi;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mencegah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja bersama saksi mengelola usaha, namun sekarang Penggugat sudah mempunyai usaha sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini Penggugat langsung menanggapi keterangan saksi tersebut yaitu keterangan saksi benar dan Penggugat tidak ada keberatan;

2. DAUD Bin JON PETRUS PONGBULAAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi saksi tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan Penggugat hanya sebagai tetangga rumah saksi di Desa Magrasari;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan isteri dari Penggugat dan saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui untuk hal apa dihadirkan dipersidangan ini yaitu untuk dapat memberikan keterangan bahwa Penggugat bermaksud untuk menggugat cerai istrinya yaitu Tergugat;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah bujang dan Tergugat adalah gadis;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gavriel Alvaro;
- Bahwa Sejak Penggugat dengan Tergugat menikah telah tinggal bersama keluarga Penggugat sampai sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mengetahui Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut diantaranya adalah soal anak;

- Bahwa Penggugat bekerja bersama orang tuanya mengelola usaha, namun sekarang Penggugat sudah mempunyai usaha sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini Penggugat langsung menanggapi keterangan saksi tersebut yaitu keterangan saksi benar dan Penggugat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, Penggugat pada persidangan tanggal 7 Agustus 2019 menyatakan akan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula, Penggugat sanggup untuk memberikan nafkah dari biaya pendidikan anaknya sampai dewasa, serta bersedia untuk memelihara, dan mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut melalui Juru Sita yang menjalankan relaas panggilan sidang tertanggal 08 Juli 2019, dan relaas panggilan sidang tanggal 19 Juli 2019, adapun relaas panggilan sidang tersebut dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 390 ayat (3) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 718 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana ketentuan tersebut diatas akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk mewakili Tergugat dalam hal menghadapi perkara *a quo* maka putusan dalam perkara *a quo* akan di putus dengan tanpa kehadiran Tergugat atau *verstek* berdasarkan ketentuan *Pasal 125 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ *Pasal 149 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah mengajukan ataupun mengirimkan jawaban atau keberatannya terhadap

surat gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat akan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu untuk meneliti secara cermat terhadap kewenangan (*kompetensi*) mengadili dalam perkara *a quo* meskipun Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir dan tidak pernah mengajukan atau mengirimkan jawabannya dalam perkara *a quo*, akan tetapi secara *ex officio* (jabatannya) maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memeriksa dan meneliti surat gugatan Penggugat agar tidak sampai salah dalam hal memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu untuk kewenangan (*kompetensi*) secara *Absolut* yaitu Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 160 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)* maupun secara *Relatif* sebagaimana ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 159 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)*, selain itu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum maupun sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maupun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati surat gugatan Penggugat yang telah teregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, dan berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* selanjutnya berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen, maka sudah sepatutnya perkara *a quo* tersebut diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana *posita* gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-7 diketahui kalau Penggugat beragama Kristen begitu juga dengan Tergugat sehingga sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor

49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian *a quo* adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mensyaratkan bahwa "antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa khusus terhadap gugatan perceraian atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, Majelis Hakim diharapkan harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian antara suami isteri tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan *ikatan lahir* adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan *ikatan batin* adalah merupakan ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin ini tentunya akan memuatkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan perceraian dengan alasan adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang pada mulanya pertengkaran tersebut masih bisa diselesaikan, akan tetapi dengan seiringnya waktu percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan tidak bisa lagi diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, harus benar-benar berupaya untuk :

- Secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak;

- Dalam pemeriksaan di persidangan harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan antara suami isteri;
- Secara yuridis formil (kebenaran formal), Majelis Hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut;
- Secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), Majelis Hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-1 (satu) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-2 (dua) dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan setiap *petitum* gugatan Penggugat secara seksama dan teliti menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) *a quo* Majelis Hakim akan memeriksa lebih dahulu terhadap keabsahan dari status perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam uraian *positanya* Penggugat menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat sebagaimana bukti P-3 dan bukti P-4 serta sebelumnya Penggugat serta Tergugat sudah melaksanakan perkawinan secara agama yang dilangsungkan dihadapan penguasa agama yang bernama Pdt. Johan Petrus Pongbulaan pada tanggal 18 Maret 2017, oleh sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup sebagai pasangan suami istri yang sah, selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sebagaimana *posita* angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat kalau pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai

sua ni dan kepala rumah tangga yang sah dan tidak menghargai orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka pada sekitar bulan Januari 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan hidup sendiri-sendiri, Penggugat memilih bertahan tinggal bersama orang tuanya di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, sedangkan Tergugat bersama anaknya tinggal di rumah tantenya di Desa Karangjati Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* gugatannya Penggugat tidak ada menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, akan tetapi karena adanya *petitum subsidair* dari Penggugat yang berkaitan dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka sebagaimana Pasal 178 ayat (2) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 189 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.B.G.)* Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum subsidair* dari Penggugat yang berkaitan dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) tersebut sepanjang tidak keluar dari perkara pokok yang dimaksud dalam *petitum primairnya* dan Majelis Hakim didalam memeriksa suatu perkara disamping memperhatikan *legal justice* perlu juga mempertimbangkan *moral justice* dan bagaimana menjatuhkan putusan dengan adil dan tuntas, maka sangat relevan menurut hukum apabila dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sehelum menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *posita* gugatannya kalau perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat sebagaimana bukti P-3 dan bukti P-4 serta dipersidangan Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang membenarkan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu melalui keterangan saksi Agus Widjang Narto Bin Wiryo Taruno (Alm), dan keterangan saksi Daud Bin Jon Petrus Pongbulaan, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat memang sudah menikah dan pernah hidup bersama selama ± 2 (dua) tahun sejak menikah pada 18 Maret 2017 dalam ikatan perkawinan sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan kalau Penggugat dan Tergugat memang

benar berstatus sebagai suami dan istri, hal tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti surat P-3 dan bukti P-4 tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 165 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* mempunyai kekuatan sebagai alat bukti sempurna (*volledig bewijskracht*), selain itu juga bukti Penggugat tersebut diperkuat dengan adanya keterangan saksi Agus Widjang Narto Bin Wiryo Taruno (Alm), dan keterangan saksi Daud Bin Jon Petrus Pongbulaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*, yang membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai pasangan suami dan istri yang sah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni sejak bulan Agustus 2017 perselisihan tidak kunjung selesai, pada mulanya perselisihan tersebut masih dapat diselesaikan, akan tetapi seiring berjalannya waktu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi, bahwa hal-hal yang memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang sah dan Tergugat tidak menghargai orang tua dari Penggugat. Atas hal tersebut, Penggugat masih mencoba mempertahankan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat masih menyayangi anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hingga puncaknya pada sekitar bulan Januari 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan hidup sendiri, Penggugat memilih bertahan tinggal bersama orang tuanya di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, sedang Tergugat bersama anaknya tinggal di rumah tantenya di Desa Karangjati Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Serta berdasarkan bukti P-6 yang berisikan mengenai surat pernyataan cerai yang telah dibuat oleh Tergugat yang dibuat pada 26 Juni 2019 yang berisi pada pokoknya antara pihak Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai namun dari pihak Tergugat tidak bisa mengikuti proses persidangan sehingga Tergugat menyerahkan seluruhnya proses perceraian tersebut kepada pihak Penggugat. Sehingga dari keadaan-keadaan yang terjadi tersebut dapat diperoleh suatu fakta hukum kalau

antara pihak Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan sehingga membuat pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengajukan perceraian atas pernikahan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut maka apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan maka dari itu sangat beralasan hukum apabila ***petitum ke-2 (dua)*** dari Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap ***petitum ke-4 (empat)*** gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dapat membuktikan kalau Anak atas nama Gavriel Alvaro sebagaimana bukti P-5 dan P-7 adalah anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* anak tersebut sebagaimana *posita* gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang anak sudah tinggal bersama Tergugat, dan mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan pembinaan, bimbingan, perhatian serta kasih sayang dari Tergugat sebagai ibu kandung maka beralasan hukum juga apabila hak asuh para Anak diberikan kepada Penggugat namun untuk menjaga kesejahteraan dan mental anak tersebut yang juga masih membutuhkan kasih sayang dan sosok dari seorang ayah maka dari itu meskipun hak asuh anak jatuh kepada Tergugat, maka tidak akan mengurangi hak dari Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut. Maka dari itu sudah sepatutnya terhadap ***petitum ke-4 (empat)*** *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" dan "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mereka berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*" dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 24 ayat (2) "*Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :*
a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri". Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai oleh karena hak asuh terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah Majelis Hakim tentukan berada dibawah hak asuh Tergugat maka terhadap biaya hidup dan biaya pendidikan dari anak tersebut wajib menjadi tanggung jawab dari orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak menyatakan hal tersebut, namun menurut Majelis Hakim pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraian sepanjang tidak keluar dari konteks pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat maka hal tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga tidak menjadi *ultra petita*;

Menimbang, atas dasar Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 24 ayat (2) maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap masa / lamanya waktu pemberian nafkah yang akan diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah sangat jelas bahwa seorang anak dinyatakan dewasa adalah apabila sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dari hal tersebut maka menurut Majelis Hakim lamanya waktu bagi Tergugat untuk memberikan nafkah hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama Gavriel Alvaro adalah sampai anak Penggugat dan Tergugat ter sebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ***petitum ke-3 (tiga)*** gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-3* gugatan Penggugat *a quo* setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama maka sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987 memang mengharuskan agar sebuah perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar

segera diserahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri, akan tetapi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan yang dalam hal ini Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditujukan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil dimana dikeluarkannya Akta Perkawinan tersebut dan dalam perkara *a quo* maka apabila putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap Penggugat ataupun Tergugat diwajibkan untuk melaporkan Putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan demikian ***petitum ke-3 (tiga)*** gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap ***petitum ke-1 (satu)*** gugatan Penggugat maka oleh karena seluruh *petitum* gugatan Penggugat telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah juga dikabulkan maka sangat relevan dan berdasarkan hukum apabila terhadap ***petitum ke-1 (satu)*** dari gugatan Penggugat *a quo* juga Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap ***petitum ke-5 (lima)*** gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan seluruh *petitum* gugatan Penggugat sudah Majelis Hakim kabulkan sehingga dalam perkara *a quo* secara formil kedudukan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal 181 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 192 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* sangat beralasan hukum apabila dalam perkara *a quo* Tergugat juga dihukum untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* sehingga sangat relevan dan berdasarkan hukum apabila terhadap ***petitum ke-5 (lima)*** dari gugatan Penggugat *a quo* juga Majelis Hakim kabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, Pasal 178 ayat (2) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 139 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3328-KW-20032017-0001 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum yang tetap;
5. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : GRAVIEL ALVARO berada di bawah hak asuh Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;
6. Menetapkan Penggugat untuk memberikan hak nafkah hidup dan biaya pendidikan yang diperlukan anaknya yang secara teratur diberikan pada setiap bulan sampai dewasa atau sudah menikah;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh kami R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANGGI MAHA CAKFI, S.H.M.H, dan RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh JOHAN SOFI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Slawi dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Anggi Maha Cakri, S.H. M.H.

Ttd

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Ttd

Rarum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Johan Sofi, S.H.

UNTUK TURUNAN YANG SAR;
PANITERA PENGADILAN NEGERI SLAWI

MUHYAR, SH.MH.
NIP.19830120 198302 1 001

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 416.000,00

(Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Andhika Prasetya Sirait
NPM : 5116500030
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 13 Juni 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Teuku Umar Rt03/Rw03 No.1
Desa Dukuhsalam Kec.Slawi Kab. Tegal

Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD N Slawi Kulon 06	2003	2009
2	SMP N 1 Wanasari Brebes	2009	2012
3	MA NU 03 Brebes	2012	2016
4	S1 Ilmu Hukum	2016	-

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 13 Januari 2020

Hormat saya,



Andhika Prasetya Sirait